

JURNAL HI

Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Syafira Widiastmarani

[STRATEGI ROBERT MUGABE MENGHADAPI SANKSI BARAT AKIBAT KEBIJAKAN FAST TRACK LAND REFORM PROGRAMME PADA TAHUN 2000-2012]

Sebuah penelitian mengenai bagaimana strategi Robert Mugabe menghadapi sanksi Barat akibat kebijakan Fast Track Landreform Programme pada tahun 2000-2012?

**STRATEGI ROBERT MUGABE MENGHADAPI SANKSI BARAT AKIBAT KEBIJAKAN
FAST TRACK LAND REFORM PROGRAMME PADA TAHUN 2000-2012**

*(Robert Mugabe's Strategy Facing Western Sanctions
Due To Fast Track Land Reform Programme In 2000-2012)*

Syafira Widiastmarani

20160510037

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183

Syafirawd@gmail.com

Abstract

This research will explain how Robert Mugabe's strategy in dealing with Western sanctions due to the Fast Track Land Reform Program (FTLRP) policy in 2000-2012. The new land reform policy has caused controversy and chaos in Zimbabwe, because in its implementation there have been acts of discrimination and violence against white farmers. The existence of human rights violations in the implementation of the policy, the United States, the European Union, and Australia provide economic sanctions against Zimbabwe. Sanctions from Western countries have a significant impact on the Zimbabwean economy. Using the Alliance theory and the concept of international cooperation, this research answers how Robert Mugabe's strategy was carried out when Western countries stopped providing financial assistance to Zimbabwe.

Keywords : Fast Track Land Reform Programme, Robert Mugabe, Strategy, Landreform

A. Pendahuluan

Rhodesia Selatan merupakan suatu wilayah di Afrika Selatan yang kini merupakan wilayah dari negara Zimbabwe. Nama tersebut merujuk pada seorang yang bernama Cecil Rhodes, yaitu seorang yang berasal dari Britania Raya (Inggris) yang pertama kali datang ke wilayah Rhodesia dan menjadi pendiri dari koloni Britania Raya di Afrika (Bradbury & Malden, 2008). Rhodesia Selatan memang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari barang tambang hingga hasil pertaniannya. Mineral yang dimiliki oleh wilayah ini meliputi besi, nikel, platinum, batu bara, krom, asbes, berlian, dan emas. Dari seluruh tanah di wilayah Rhodesia, hampir 60% wilayahnya diselimuti oleh batuan granit, dan didalamnya terkandung hampir 90% mineral. Bahkan, produksi emas bisa mencapai 20 ton per tahun. Hal tersebut juga menjadi alasan Cecil Rhodes mendirikan Perusahaan Dagang Inggris-Afrika pada tahun 1889 (Hermawan, 2017). Dari sini lah kemudian adanya pembagian tanah di wilayah Rhodesia, yang terbagi menjadi Rhodesia Utara (Zambia) dan Rhodesia Selatan (Zimbabwe). Tanah-tanah ini pun dikuasai oleh orang-orang kulit putih yang membuka lahan pertambangan maupun pertanian untuk mencari peruntungannya (Mutasa, 2017).

Selain memanfaatkan sektor pertambangan, Rhodesia Selatan (Zimbabwe) pun memanfaatkan sektor pertaniannya. Namun, mayoritas lahan-lahan pertanian dimiliki oleh penduduk kulit putih. Sedangkan, penduduk pribumi kulit hitam hanya memiliki sebagian kecil lahan tanah. Lahan penduduk pribumi pun bukanlah lahan yang subur, sehingga membuat penduduk pribumi banyak yang bekerja pada petani kulit putih yang memiliki lahan pertanian yang lebih luas dan subur. Para pendatang kulit putih tersebut menjadi tuan tanah, dan para petani pribumi kulit hitam menjadi pekerja-pekerja di tanah mereka (Hermawan, 2017). Walaupun dari segi jumlah golongan kulit hitam merupakan golongan mayoritas di Rhodesia Selatan (Zimbabwe), tetapi pemegang pucuk pemerintahan di Rhodesia Selatan (Zimbabwe) adalah golongan kulit putih sebagai awal dari adanya praktek politik Apartheid (Republik Eusosialis Tawon, 2015).

Kesenjangan ini kemudian berlanjut pada tahun 1910, ketika Uni Afrika Selatan yang berada di bawah kendali Inggris membentuk struktur politik di kawasan Afrika Selatan. Tindakan diskriminasi pun diimplementasikan sejak awal dalam struktur politik tersebut, seperti adanya kepemilikan lahan tanah

yang timpang antara penduduk kulit putih dengan penduduk pribumi kulit hitam di Rhodesia Selatan (Zimbabwe). Kesengsaraan yang dialami oleh penduduk Rhodesia Selatan (Zimbabwe) berlanjut dan diperparah oleh diberlakukannya Land Apportionment Act of 1930 yang dibuat oleh orang-orang kulit putih Inggris. Undang – undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pemindahan lahan dan juga memberikan wewenang yang lebih kepada penduduk kulit putih untuk mengolah lebih dari 50% dari total sumber daya alam produktif. Sektor pertanian, industri, dan manufaktur yang dikuasai oleh penduduk kulit putih hanya dapat menampung tidak lebih dari satu dari sepuluh penduduk pribumi yang ada (Bonarjee, 2013).

Setelah kemerdekaan, nama Rhodesia Selatan resmi diganti menjadi Zimbabwe. Negara ini pun memiliki nama resmi, yaitu Republik Zimbabwe atau Republic of Zimbabwe yang beribukota di Harare (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Dalam konferensi tersebut juga menyepakati diadakannya pemilihan umum, yang telah disetujui diadakan pada bulan Februari 1980. Robert Gabriel Mugabe berhasil memenangkan pemilu dan diangkat sebagai Perdana Menteri pada 8 Maret 1980 untuk masa jabatan 5 tahun (Meredith, 2007). Mugabe pun sangat

memperjuangkan hak-hak penduduk pribumi Zimbabwe agar dapat menikmati kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan dengan penduduk kulit putih. Ini adalah awal dari terbentuknya kebijakan program Landreform atau distribusi lahan, yaitu pada bulan September 1980. Program ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan kepemilikan lahan dan sektor pertanian komersial berskala besar yang lebih condong dimiliki oleh penduduk kulit putih. Sedangkan, sektor pertanian tradisional kecil dimiliki oleh penduduk pribumi Zimbabwe (Zikhali, 2008). Oleh karena itu, Mugabe ingin mengubah kepemilikan lahan yang dimonopoli oleh penduduk kulit putih agar bisa berpindah tangan ke penduduk pribumi dan juga bisa mendongkrak penghasilan penduduk pribumi (Moyo S. , 2011).

Pada tahun 1987, perubahan konstitusi dilakukan oleh Robert Mugabe, yaitu perubahan sistem parlementer menjadi sistem presidensial yang mulai berlaku pada 1 Januari 1988 yang juga menjadikan Mugabe sebagai presiden eksekutif pertama di Zimbabwe dengan Joshua Nkomo sebagai wakil presidennya (Downie, 2011). Setelah Robert Mugabe mendapat jabatan sebagai Presiden Zimbabwe, ia tetap menjalankan program Landreform-nya untuk dapat memenuhi

target yang diinginkan pemerintah Zimbabwe. Keberlanjutan dari program ini diharapkan mampu untuk mendongkrak pertanian petani pribumi dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian petani tersebut. Namun, pada tahun-tahun berikutnya program Landreform belum mencapai target yang diinginkan pemerintah. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Mugabe pun membuat suatu perubahan yang dapat memperbaiki program Landreform (Chitsike, 2003).

Robert Mugabe membuat kebijakan baru untuk meningkatkan proses Landreform menuju tahap yang lebih radikal, yaitu Fast Track Landreform Programme (FTLRP) yang dicanangkan pada tahun 2000. Kebijakan tersebut berbicara mengenai pengambilalihan lahan pertanian kulit putih yang dilakukan secara paksa tanpa kompensasi apapun. Tanah-tanah yang diambil alih tersebut akan dibagikan secara merata kepada petani-petani penduduk kulit hitam Zimbabwe untuk digarap dalam rangka menghasilkan produk pangan lokal berbasis pertanian lokal. Pengambilan lahan tanah milik orang-orang kulit putih ini dilakukan oleh veteran perang, militan ZANU-PF dan petani kulit hitam. Dalam pelaksanaannya, program baru ini menggunakan cara pemaksaan dan kekerasan terhadap

pemilik tanah orang-orang kulit putih. Tidak hanya orang-orang kulit putih yang terluka bahkan terbunuh, tetapi orang-orang kulit hitam yang juga menjadi korban akibat adanya perlawanan. Kondisi di Zimbabwe pun mulai tidak kondusif akibat pemberlakuan program baru tersebut (Meredith, 2007).

Oleh karena itu, kebijakan Fast Track Landreform Programme (FTLRP) ini dianggap negara-negara Barat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena adanya tindak kejahatan terhadap hak milik properti orang lain dan praktek kekerasan melalui intimidasi dan pemukulan terhadap orang-orang kulit putih. Kebijakan ini pun mendapat protes keras dari dunia internasional dengan pemberian sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Sanksi-sanksi tersebut berupa penghentian bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan African Development Bank (ADB) oleh Amerika Serikat pada tahun 2001, penghentian bantuan dana pembangunan dan embargo senjata oleh Uni Eropa pada tahun 2002, serta pembatasan transaksi keuangan apapun dan embargo senjata oleh Australia pada tahun 2002 (Marongwe, 2004). Negara-negara Barat tersebut memberikan sanksi terhadap Zimbabwe agar Robert Mugabe

sebagai pemimpin negara menghentikan kebijakan Fast Track Land Reform Programme (FTLRP) untuk dapat melindungi dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kulit putih yang tinggal di Zimbabwe agar tetap aman dan mendapatkan haknya (Youde, 2013).

Dampak dari sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat ini menyebabkan perekonomian Zimbabwe merosot terjun bebas. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000, yaitu saat mulai dicanangkannya program landreform yang baru, perekonomian Zimbabwe masih relatif aman. Namun, dari tahun 2000 yang merupakan pengesahan secara resmi kebijakan Fast Track Landreform Programme (FTLRP), ekonomi Zimbabwe mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena kesalahan dalam pengelolaan lahan pertanian yang merupakan pendorong ekonomi Zimbabwe. Penurunan ekonomi yang signifikan ini juga diperparah oleh dijatuhkannya sanksi-sanksi oleh negara-negara Barat terhadap Zimbabwe. Selama program baru landreform tersebut berlangsung dan adanya sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia, sampai pada tahun 2007, tingkat defisit dan inflasi di Zimbabwe mencapai yang tertinggi (African Development Bank Group, 2016).

B. Kerangka Berfikir

1. Teori Aliansi

Aliansi merupakan peran sentral dalam hubungan internasional karena dipandang sebagai bagian integral dari tata negara. Negara-negara yang kuat dan lemah sama-sama merasakan kebutuhan untuk membentuk suatu aliansi. Negara lemah masuk ke dalam aliansi ketika mereka membutuhkan perlindungan terhadap negara kuat dengan tujuan untuk mempertahankan diri. Sedangkan, negara-negara kuat masuk ke dalam aliansi untuk melawan negara-negara kuat lainnya dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (Dwivedi, 2012). Aliansi biasanya dimaknai hanya sebagai aliansi militer, aliansi keamanan, dan aliansi pertahanan. Namun, dalam perkembangannya, Aliansi tidak hanya dimaknai sebagai aliansi yang bersifat militer atau keamanan atau pertahanan saja, tetapi aliansi juga ada yang bersifat ekonomi, seperti aliansi perdagangan (Davie, 2017). Menurut George Liska,

“Aliansi dilakukan oleh suatu negara karena untuk mengurangi dampak kekuatan antagonis yang dianggap sebagai tekanan yang dapat mengancam independensi suatu negara dan untuk saling melengkapi kemampuan masing-masing”.

Goerge Liska juga menyatakan dalam terminologi ekonomi, aliansi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan berbagi kewajiban. Keputusan untuk menyelaraskan, dalam bentuk apa, dan dengan siapa atau tidak untuk menyelaraskan, sebagai bagian dari kebijakan yang sengaja dibuat dengan mengacu pada kepentingan nasional suatu negara (Dwidevi, 2012). Menurut Peter Evans, proses terwujudnya sebuah aliansi adalah adanya kebutuhan dari dua atau lebih aktor karena adanya ancaman dari negara lain, sehingga membutuhkan perlindungan dari negara lain. Dalam teori aliansi, semua negara anggota mendapatkan jaminan keamanan dari aktor yang dominan dalam keanggotaan aliansi tersebut (Subagyo, 2016). Adapun alasan untuk beraliansi, menurut Nye, selain dibangun atas alasan militer, juga dibangun atas alasan non militer. Dua hal yang paling utama adalah dengan alasan persamaan ideologi dan ekonomi (Griffiths M. T., 2002). Merujuk pada persamaan ideologi dan latar belakang sejarah, serta ekonomi, ada pembagian wilayah negara yang ada di dunia, yaitu “*West*” dan “*East*”. Menurut Michael Michelini, pada gambar 1.2, Western Country mengacu pada Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Australia dan Selandia Baru. Sedangkan, pada gambar 1.3, Eastern Country terdiri

dari negara-negara di Asia termasuk juga Timur Tengah (Michelini, 2019).

Dalam kasus penelitian skripsi ini, karena negara-negara Barat (Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia) memberikan sanksi terhadap Zimbabwe, sangat tidak mungkin untuk Zimbabwe beraliansi dengan negara-negara Barat tersebut. Sehingga, pilihan alternatifnya adalah Robert Mugabe berusaha melakukan aliansi dengan Eastern Country atau negara-negara Timur, seperti Indonesia, India, Iran, dan Cina yang dimuat dalam kebijakan Look East. Robert Mugabe merasa terancam dengan adanya sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia akibat diberlakukannya kebijakan Fast Track Land Reform Programme di Zimbabwe. Mugabe beraliansi dengan negara-negara Timur (Eastern Country), dengan tujuan membantu negara Zimbabwe bertahan dalam menghadapi dampak dari sanksi Western Country atau negara-negara Barat di berbagai bidang, seperti dalam bidang keamanan dan pertahanan, serta ekonomi. Dengan adanya aliansi ini, diharapkan mampu membantu Zimbabwe dalam mempertahankan kekuatan negaranya dari ancaman negara-negara Barat.

2. Konsep Kerjasama Internasional

Asas utama negara melakukan kerjasama internasional adalah guna memenuhi kebutuhan kepentingan nasionalnya yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Definisi kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun,

“Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan akan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun multilateral” (Coplin, 1992).

Kerjasama internasional itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara- negara yang terlibat di dalamnya. Pada dasarnya semua negara menginginkan keuntungan timbal balik yang optimal demi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, dalam pelaksanaannya akan ada saling tukar menukar barang dan jasa, memperluas penggunaan teknologi, atau dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti yang dilakukan Robert Mugabe dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara Timur untuk dapat menanggulangi krisis ekonomi yang semakin kompleks akibat kebijakan Landreform-nya yang di kecam oleh negara-negara Barat.

Pada tahun 2003, Presiden Mugabe menerapkan kebijakan Look East, yang dimaksudkan untuk meningkatkan jalinan kerjasama investasi dengan negara- negara Timur. Di saat negara-negara Barat dan institusi finansial internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank menolak untuk memberikan pinjaman ataupun kerjasama ekonomi dengan Zimbabwe, Mugabe merealisasikan kebijakan Look East tersebut dengan melakukan kerjasama internasional dengan Eastern Country, yaitu Indonesia, India, Iran, dan Cina. Kerjasama tersebut mencakup bidang ekonomi maupun militer. Kerjasama ini diharapkan oleh Robert Mugabe dapat membuktikan bahwa Zimbabwe bisa bertahan tanpa ketergantungan dengan negara-negara Barat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan bagaimana strategi Robert Mugabe menghadapi sanksi Barat akibat kebijakan *Fast Track Land Reform Programme* pada tahun 2000-2012. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan wibsite.

D. Hasil Penelitian

A. Dasar diambalnya Kebijakan *Look East* di Zimbabwe

Fenomena yang menarik terjadi di benua Afrika saat memasuki abad ke-21 yang diwarnai dengan kehadiran negara-negara Asia Timur yang semakin intens dan terlihat giat beraspirasi dalam rivalitas. Tak terkecuali juga dengan negara Zimbabwe yang ikut serta menarik negara-negara Asia Timur untuk bisa berinvestasi lebih di negaranya, mengingat diadopsinya kebijakan *Look East*. Adanya permasalahan yang kompleks di Zimbabwe, membuat Robert Mugabe sebagai orang yang paling berkuasa berinisiatif untuk menggunakan kebijakan tersebut untuk membantu perekonomian Zimbabwe yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi, akibat dijatuhkannya sanksi oleh negara-negara Barat. Tujuan negara-negara Barat memberikan sanksi terhadap Zimbabwe sendiri, agar Robert Mugabe sebagai pemimpin negara menghentikan kebijakan *Fast Track Land Reform Programme* (FTLRP) untuk dapat melindungi dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kulit putih yang tinggal di Zimbabwe agar tetap aman dan mendapatkan hak propertinya secara adil tanpa adanya tindak kekerasan (Youde, 2013). Namun, pemerintah Mugabe mengabaikannya dan tidak gemetar dalam

menghadapi sanksi Barat tersebut. Alih-alih menganggapnya sebagai tanda perlunya reformasi ulang terhadap kebijakan *landreform* yang baru, Robert Mugabe dan ZANU-PF justru menafsirkan sanksi tersebut sebagai bukti bahwa negara-negara Barat berusaha untuk merekolonisasi Zimbabwe dan negara-negara berkembang (Fathiraini, 2015). Sanksi yang diberikan oleh Barat bukan merupakan alat untuk mempromosikan pemerintahan yang baik, tetapi lebih kepada strategi yang disengaja untuk melemahkan negara Zimbabwe, sehingga Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Kebijakan *Look East* Zimbabwe didasarkan pada keyakinan, bahwa lebih baik untuk menemukan kelompok sekutu baru yang akan terlibat dengan Zimbabwe tanpa khawatir tentang politik dalam negerinya, daripada mencoba menjilat dengan negara-negara yang berusaha hanya untuk melemahkan negara Zimbabwe. Presiden Mugabe pernah mengatakan, bahwa “Kami telah berbelok ke timur di mana matahari terbit, dan memberikan punggung kami di Barat tempat matahari terbenam (Mdlongwa, 2015). Kementerian Luar Negeri Zimbabwe sendiri sebenarnya tidak pernah merilis dokumen resmi yang menguraikan prinsip-prinsip kebijakan *Look East*, tetapi

tekanan dasarnya jelas dalam pernyataan pemerintah dan pola perjalanan internasional para pejabat Zimbabwe. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara kawasan Asia Timur, seperti Cina, Indonesia, Iran, dan India (Youde, 2013).

Kebijakan Look East yang diluncurkan pada tahun 2003 ini merupakan sebuah upaya dari Robert Mugabe sebagai Presiden untuk menghadapi sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Australia. Sanksi Barat yang didukung oleh partai oposisi Movement Democratic Change (MDC) telah memukul negara Zimbabwe dengan keras yang mengakibatkan kekurangan mata uang asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku untuk manufaktur dan agroindustri di dalam negeri. Mugabe pun berusaha memanfaatkan kebangkitan kekuatan ekonomi di kawasan Asia Timur yang memiliki modal finansial dan keahlian teknis yang diperlukan untuk menggantikan investasi Barat yang menyusut ke Zimbabwe. Kebijakan Look East ini memiliki tujuan agar Zimbabwe tidak ketergantungan dengan negara-negara Barat, terutama dalam hal ekonomi. Robert Mugabe mengatakan bahwa kebijakan pemerintahannya, yaitu "Lihat Timur" atau Look East adalah langkah

yang efektif untuk melawan sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat dan memberdayakan warga Zimbabwe sendiri. Kebijakan ini dianggap mampu memberdayakan masyarakat, jika dibandingkan dengan kebijakan Barat dalam mendanai proyek yang tidak memberdayakan masyarakat di tingkat lokal (Oxford Analytica, 2007).

Zimbabwe sendiri telah memperkuat hubungan ekonominya dengan beberapa negara Timur, seperti Cina, India, Indonesia, dan Iran. Mugabe menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Zimbabwe akan segera pulih ketika kebijakan Look East mulai berbuah. Alasan mengapa perlu beberapa saat bagi ekonomi untuk pulih berutang banyak pada cara ekonomi Zimbabwe telah selaras dengan ekonomi Barat. Sejak Zimbabwe memulai kebijakan Look East telah ada banyak kegiatan sebagai pelaku bisnis dari negara-negara Asia, terutama dari negara Cina yang berusaha untuk berinvestasi di Zimbabwe dengan mencari kesepakatan yang menguntungkan di sektor listrik dan pertambangan, serta dalam bidang perdagangan. Mugabe mengatakan bahwa Zimbabwe belajar banyak dari negara-negara Timur, seperti Indonesia di mana negara tersebut telah menerapkan kebijakan Usaha Kecil dan Menengah

yang disengaja yang mengarah pada pertumbuhan ekonominya.

Ada lima tujuan Zimbabwe menerapkan kebijakan Look East: (Youde, 2007).

- Dekolonisasi dan pembebasan Afrika; kedaulatan dan kesetaraan antar negara-negara di dunia,
- Pembangunan ekonomi di negara dunia ketiga,
- Memerangi Apartheid dan memanfaatkan sosialisme, sekaligus kapitalisme, dan
- Kedaulatan negara; prinsipnya, suatu negara tak boleh mencampuri urusan negara lain.

Embargo perjalanan dan pembekuan aset dapat membuat pejabat terkemuka di partai politik Front Persatuan Patriotik Nasional Zimbabwe (ZANU-PF) Mugabe tidak mengunjungi Belanda atau melakukan bisnis di Amerika Serikat, tetapi itu bukan satu-satunya jalan untuk keterlibatan diplomatik di Dunia. Mugabe dan sekutunya telah menumbuhkan aliansi diplomatik alternatif dengan menghadirkan Zimbabwe sebagai korban neokolonialisme Barat dan eksploitasi ekonomi. Kepemimpinan telah mengembangkan jaringan dukungan yang memungkinkannya untuk terlibat dengan

seluruh dunia. Pada saat yang sama, Mugabe telah menawarkan pengalamannya sebagai kisah peringatan kepada sekutu-sekutunya: pengalaman Zimbabwe dengan Barat adalah simbol dari keinginan yang terakhir untuk mengkolonisasi seluruh dunia, dan Mugabe adalah benteng melawan eksploitasi semacam itu; karena itu, mendukung Zimbabwe sama dengan menolak eksploitasi dan neokolonialisme Barat. Pendekatan ini dimasukkan ke dalam tema kebijakan luar negeri umum Zimbabwe, yang menekankan pada pemberdayaan dan kedaulatan Afrika, sementara juga memberikan dorongan tambahan bagi negara-negara non-Barat untuk bersekutu dengan Zimbabwe. Digabungkan, berbagai elemen membentuk dasar dari kebijakan "Lihat Timur" Zimbabwe, yang telah digunakan untuk melawan label pariah dengan menciptakan tempat baru di mana untuk menggunakan pengaruh kebijakan luar negerinya. Melalui kebijakan Look East, Mugabe pada dasarnya memanfaatkan pusat-pusat kekuatan baru dalam komunitas global. Alih-alih terisolasi dan dijauhi, Zimbabwe telah menciptakan jalur diplomatik paralel yang sebagian besar mengabaikan tuntutan Barat (Youde, 2013).

B. Realisasi dari Kebijakan *Look East*

1. Hubungan Bilateral Zimbabwe-Indonesia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Zimbabwe telah dimulai sejak dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota Zimbabwe, Harare pada 14 Agustus 1986. Meskipun memang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Zimbabwe telah terjalin selama 29 tahun lamanya, Pemerintah Zimbabwe sendiri baru membuka kedutaannya di Indonesia pada bulan Oktober 2004. Hal tersebut baru dilakukan karena memang baru diterapkannya kebijakan *Look East* dalam politik luar negeri Zimbabwe akibat dari dampak dari adanya sanksi ekonomi yang berlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia.

Hubungan Zimbabwe dengan Indonesia semakin terjalin baik dikarenakan kedua negara ini memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai forum sub regional, regional dan internasional. Dukungan Zimbabwe terhadap Indonesia dalam forum internasional terlihat ketika pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008. Begitupun sebaliknya dengan dukungan Indonesia kepada Zimbabwe dalam Komite Tiga Sidang Umum ke-59 Majelis

Umum PBB. Hubungan politik antara kedua negara terjalin dengan baik dengan adanya kerjasama dalam berbagai bidang dan adanya upaya saling dukung dalam berbagai fora internasional (Embassy of the Republic of Indonesia in Harare, 2018). Selain kunjungan yang bersifat bilateral, Zimbabwe juga sering mengunjungi Indonesia untuk mengikuti forum internasional, seperti Gerakan Non Blok (GNB). Robert Mugabe sebelumnya pernah datang ke Indonesia pada tahun 1992 untuk menghadiri KTT Non-Blok ke 10. Kemudian, pada tanggal 23 Februari 2003, Robert Mugabe bertemu dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di Kuala Lumpur, Malaysia untuk membahas revitalisasi GNB (HM Soeharto, 1991).

Dalam bidang perdagangan, Zimbabwe dan Indonesia sependapat bahwa volume perdagangan relatif lebih sedikit menguntungkan Zimbabwe. Produk perdagangan umumnya dikirim melalui pelabuhan Durban di Afrika Selatan atau pelabuhan Beira di Mozambik. Potensi produk Indonesia yang dapat memasuki pasaran Zimbabwe, yaitu kerajinan tangan, produk kulit, kertas, alat tulis kantor, peralatan medis, produk tekstil, barang elektronik, produk karet, plastik, mesin pengemasan, generator, kompor gas, bahan kimia, obat-obatan, barang pecah belah, alat-alat pertanian, alat tulis kantor dan

suku cadang kendaraan bermotor (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Zimbabwe sendiri sangat mengharapkan pengusaha-pengusaha Indonesia mau menanamkan modal di negaranya. Terlihat pada tahun 2012, ekspor Zimbabwe ke negara Indonesia pernah mencapai \$46 juta. Hal inilah yang membuat Zimbabwe merasa ada potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan antara Zimbabwe dan Indonesia (The Jakarta Post, 2014).

Berikut kerjasama yang dilakukan oleh Zimbabwe dan Indonesia dari tahun 2006-2013:

- Letter of Intent (LoI) between the State Ministry of Women Empowerment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development of the Republic of Zimbabwe Concerning the Establishment of Women's Affairs Cooperation, yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2006 di Harare Zimbabwe.
- Memorandum of Understanding (MoU) between the State Ministry for Women Empowerment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development of the Republic of Zimbabwe concerning Women`s Affairs Cooperation, yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2007 di Jakarta, Indonesia.
- MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman) on Agriculture Co-operation, ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2011 di Bali
- MoU mengenai kerjasama antara Institut Sepuluh November Surabaya dengan University of Zimbabwe, ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2012
- MoU mengenai kerjasama antara Institut Sepuluh November Surabaya dengan Harare Institute of Technology, ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2012.

2. Hubungan Kerjasama Zimbabwe-India

Zimbabwe memiliki sejarah panjang mengenai hubungan akrab dan ramah dengan India. India juga pernah sangat mendukung perjuangan kemerdekaan di Zimbabwe. Zimbabwe pun tertarik pada investasi dengan India dalam bidang energi, kereta api, kesehatan dan sektor lainnya. Zimbabwe memandang India sebagai negara adikuasa yang baru muncul, yang dari pengalaman perkembangannya mereka banyak belajar, dan satu yang berpotensi memberikan batas kredit dan berinvestasi dalam pembangunan Zimbabwe (Mea.Gov, 2013).

India mulai terlibat kerjasama dengan Zimbabwe dalam bidang perdagangan. Perdagangan antara dua negara tersebut bahkan pernah mencapai \$40 juta. Ekspor India ke Zimbabwe difokuskan pada tekstil, obat-obatan dan obat-obatan, mesin dan peralatan transportasi dan telekomunikasi dan informasi. India juga membuka jalur kredit ke negara-negara Afrika, termasuk Zimbabwe yang menjadi penerima manfaat utama. Selain investasi, India telah berusaha untuk bekerja sama dengan Zimbabwe atas dasar kemanusiaan. Selama kekeringan parah pada tahun 2003, India menyumbang 50.000 ton beras ke Zimbabwe. Ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya negara tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial baik (Nyemba, Zungura, & Mhandara, 2013). India memberikan bantuan 50.000 ton beras pada tahun 2003 ketika Zimbabwe mengalami kekeringan hebat. Bantuan serupa lainnya dari 500 ton beras diberikan pada 23 Maret 2015. India memberikan \$5 juta untuk mempromosikan UKM (Pusat Teknologi India-Zimbabwe) di Zimbabwe, sebuah proyek yang diresmikan oleh Presiden Robert Mugabe pada 4 Agustus 2008 (Embassy of India, 2019).

Kunjungan menteri dari Zimbabwe ke India telah berlangsung secara rutin sejak tahun 2006, dimulai dengan kunjungan delegasi tingkat tinggi yang

dipimpin oleh H.E. Obert Mpofu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional India untuk Pertemuan Tingkat Menteri Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) di New Delhi pada 5-6 Oktober 2006 dan melakukan sidang tertutup tentang Kemitraan Proyek India-Afrika pada 9-11 Oktober 2006. Selain itu, pada bulan April 2008, Zimbabwe telah menyerahkan rancangan Air Services Agreement atau Perjanjian Layanan Udara antara Zimbabwe dan India. Kedua belah pihak pun akhirnya menyetujui rancangan tersebut dan Air Services Agreement sudah siap untuk ditandatangani. Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sains dan Teknologi juga telah disampaikan kepada Pemerintah Zimbabwe (Mea.Gov, 2013).

3. Hubungan Kerjasama Zimbabwe-Iran

Selama akhir tahun 2000-an, Robert Mugabe memprakarsai inisiatif diplomatik yang dikenal sebagai kebijakan Look East. Dia berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia dan Timur Tengah, termasuk Iran (Reuters, 2009). Zimbabwe dan Iran telah mengembangkan hubungan ekonomi dan politik bilateralnya. Pada tahun 2005, kedua negara tersebut menandatangani beberapa perjanjian kerja sama yang

mencakup ikatan politik dan hubungan ekonomi di bidang teknologi dan infrastruktur (Farrar-Wellman, 2010). Penguatan hubungan ekonomi antara Harare dan Teheran berlanjut sampai tahun 2006, ketika Robert Mugabe kembali ke Iran dan menandatangani enam perjanjian dengan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Perjanjian-perjanjian ini mengklarifikasi kerja sama tingkat tinggi antara kedua negara di bidang pertanian, industri minyak, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan (Xinhua, Zimbabwe president back home from fruitful visit to Iran:report, 2006). Zimbabwe dan Iran juga mengkonfirmasi niat mereka untuk meningkatkan kerja sama di sektor swasta mereka dan memfasilitasi perdagangan antara kedua negara (Xinhua, 2006).

Kurangnya sumber energi domestik dan kemampuan penyulingan minyak memiliki efek besar pada kebijakan ekonomi Zimbabwe pada tahun 2000-an. Karena kekurangan mata uang asing, Zimbabwe tidak dapat mengimpor bahan-bahan yang penting untuk mempertahankan pasokan bahan bakar yang stabil di tahun 2006. Pada tahun tersebut, Iran berjanji untuk mengirim teknisi bahan bakar ke Zimbabwe untuk menyelidiki kemungkinan pembenahan satu-satunya kilang minyak negara itu, yaitu sebuah fasilitas yang awalnya

dibangun untuk memurnikan minyak mentah Iran. Menteri Energi Zimbabwe, Mike Nyambuya, mengatakan Iran membuat sejumlah proposal untuk memenuhi kebutuhan Zimbabwe dalam bahan bakar dan produk minyak (Payvand, 2006).

Selain kerjasama dalam hal militer dan ekonomi, kepentingan budaya dan bantuan kemanusiaan terdiri dari komponen penting dari hubungan Zimbabwe-Iran. Pada bulan November 2006, Mugabe dan Ahmadinejad mengeluarkan sebuah komunike bersama yang ditandatangani setelah pertemuan Komisi Gabungan Kelima di mana kedua negara menekankan tujuan mereka untuk memperluas kerja sama politik, ekonomi, dan budaya dan mengembangkan posisi terpadu mengenai masalah-masalah kepentingan bersama (Xinhua, 2006). Kemudian pada tahun yang sama, Mugabe juga berpartisipasi dalam pembicaraan dengan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad di Teheran, Iran. Mugabe menjanjikan dukungannya untuk Iran dan mengancam intervensi Barat dalam urusan Iran, dengan mengatakan bahwa "Negara-negara Non Blok harus melakukan perlawanan untuk menghadapi orang-orang jahat ini dan sistem jahat mereka," kata Mugabe. "Negara-negara yang berpikiran sama harus berkumpul dan

menyusun mekanisme untuk membela diri kita sendiri" (Fox News, 2006).

Pada bulan September 2007, Mugabe bertemu dengan Presiden Ahmadinejad di luar Majelis Umum PBB untuk membahas pendapat bersama mereka bahwa negara-negara berkembang bersatu melawan "dominasi Barat" dan neokolonialisme Amerika Serikat dan Inggris. Presiden Iran menyatakan penghargaan atas partisipasi Zimbabwe dalam sesi menteri Gerakan Non-Blok tentang hak asasi manusia yang diadakan di Teheran pada tahun yang sama (VOA, 2007). Zimbabwe dan Iran datang bersama akhir minggu itu untuk mengumumkan "koalisi perdamaian" kolaboratif mereka tentang rezim dari Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Presiden Mugabe dan Ahmadinejad membahas gagasan itu diperlukan untuk memunculkan koalisi perdamaian sebagai tanggapan terhadap agresi pengganggu global (AFP, 2007). Pada Desember 2007, Iran membuka perpustakaan di pusat kebudayaannya di Harare sebagai isyarat kerjasama budaya. Duta Besar Iran untuk Zimbabwe, Rasoul Momeni memuji pembukaan perpustakaan, "Saya berharap pertukaran budaya antara kedua negara akan dikonsolidasikan lebih lanjut dan keduanya akan mengatasi kesulitan mereka di bawah naungan kerja sama

mereka. Kami juga ingin menarik perhatian pembaca yang tertarik terhadap buku-buku tentang budaya dan adat istiadat Iran untuk membiasakan rakyat Zimbabwe dan melalui ini membangun jembatan di jalan peningkatan hubungan antara kedua negara" (Fars News Agency, 2007).

Zimbabwe dan Iran juga menandatangani perjanjian usaha patungan untuk memproduksi traktor di negara Afrika pada Maret 2008. Menurut perjanjian itu, perusahaan penanaman modal asing Iran akan mengendalikan 55% dari usaha itu. Sedangkan, Perusahaan Pengembangan Industri Zimbabwe mempertahankan keseimbangan. Target produksi adalah 5.000 traktor per tahun dengan harapan bahwa produk tersebut akan berkembang ke pasar regional di tahun-tahun mendatang. Komponen akan diimpor dari Iran dan kemudian digantikan oleh komponen domestik Zimbabwe. Iran menginvestasikan \$4 juta dalam kesepakatan itu (Ligne, 2008). Memasuki tahun 2009 di bawah bobot kehancuran ekonomi hampir total dan sanksi ekonomi. Presiden Mugabe mencari bantuan ekonomi dari beberapa negara, termasuk Iran. Kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk merenovasi kilang minyak Zimbabwe dan menawarkan pasokan bahan bakar jangka panjang

dengan imbalan memberikan hak penambangan eksklusif mineral strategis di negara Afrika (Mushekwe, 2009). Selain itu, Zimbabwe mengizinkan Iran untuk membangun pembangkit listrik gas di dalam perbatasannya.

Pada Januari 2010, Mohammad Assadi, Kepala Pusat Kebudayaan Kedutaan Besar Iran di Zimbabwe, menyatakan keprihatinan Iran atas sanksi yang dijatuhkan pada Zimbabwe oleh Inggris dan sekutunya (New Zimbabwe, 2009). Pada bulan yang sama, wakil duta besar Iran untuk Zimbabwe, Javad Dehghan, mengumumkan niat Republik Islam tersebut untuk menawarkan bantuan kemanusiaan ke Zimbabwe. Iran menyumbangkan penghambat makanan yang terdiri dari minyak goreng, makanan dan garam, dan uang tunai untuk mengamankan 250 kg benih jagung untuk proyek Zunde Ramambo di bawah pimpinan Mashayamombe sebagai bagian dari upayanya untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Zimbabwe juga menerima bantuan dari Iran dalam mekanisasi sektor pertanian, memperbarui peralatan Zimbabwe Broadcasting Holdings, dan saat ini sedang mendiskusikan kemitraan dalam pariwisata dan sektor ekonomi lainnya (The Herald, 2010).

Pada Januari 2010, Iran mengumumkan niatnya untuk menawarkan bantuan kemanusiaan ke Zimbabwe untuk menunjukkan komitmen Teheran untuk memperluas wilayah kerja sama. Wakil duta besar Iran untuk Zimbabwe, Javad Dehghan menetapkan bahwa Iran akan menyediakan 80 kursi roda, 25 kotak tablet pelengkap vitamin, peralatan bersalin, dan makanan ke sembilan klinik untuk warga Zimbabwe yang cacat. Kedutaan Iran juga menyumbangkan dana untuk Proyek Zunde Ramambo milik Kepala Mashayamombe untuk pembelian 250 kilogram benih jagung. Proyek ini merupakan bagian dari upaya memberi makan orang miskin. Dehghan menyatakan bahwa upaya kemanusiaan berkontribusi pada, "Memperkuat hubungan persaudaraan antara negara-negara kita, kami juga telah memberikan sumbangan kepada beberapa konstituensi di Zimbabwe dan sumbangan ini hari ini adalah demonstrasi lebih lanjut dari solidaritas antara negara-negara kita" (Xinhua, 2010).

4. Hubungan Bilateral antara Zimbabwe-Cina

Jejak kedekatan hubungan antara Zimbabwe dengan Cina sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Hubungan bilateral Zimbabwe-Cina telah berkembang selama bertahun-tahun yang

meliputi sektor-sektor ekonomi dan politik yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan negara. Namun, pada tahun 2000-an hubungan antar kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Terutama saat kebijakan Look East diterapkan oleh Robert Mugabe, yang menjadi tanda komitmen kedua negara untuk saling mendukung (Ojakorotu & Kamidza, 2018). Kunjungan kenegaraan pun sering dilakukan oleh kedua negara. Hubungan Zimbabwe dan Cina memiliki setidaknya tiga pilar, yaitu hubungan strategis dan diplomatik, hubungan ekonomi, dan hubungan sosial dan budaya. Hubungan Zimbabwe-Cina hanya fokus pada dukungan politik, tidak campur tangan dalam urusan negaradan penjualan senjata (Chun, 2014). Salah satu alasan kuat mengapa Zimbabwe lebih tertarik dengan negara Cina, karena Cina menganut prinsip "bisnis adalah bisnis". Cina tidak suka ikut campur dengan urusan politik negara lain. Hal tersebut merupakan satu hal yang sangat diharapkan oleh Zimbabwe. Sikap Cina ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang meminta syarat-syarat, seperti demokrasi dan penegakan HAM sebelum memberikan bantuan (Debora, 2017). Selain itu menurut Zimbabwe, Cina merupakan negara yang dikenal memiliki pengaruh besar di Asia.

Realisasi kebijakan Look East dengan negara Cina berjalan dengan adanya Forum on China Africa Cooperation (FOCAC). Forum ini telah memperkuat perdagangan dan investasi bilateral antara Zimbabwe dan Cina. Zimbabwe memanfaatkan FOCAC ini agar Cina semakin bisa terlibat dalam industri pertanian, pertambangan, konstruksi dan pariwisata Zimbabwe. Selain itu, Zimbabwe juga ingin menarik pengusaha Cina untuk masuk di industri ritel Zimbabwe (F. Tombindo, 2016). Sejak dimulainya KTT FOCAC pertama, hubungan perdagangan antara Zimbabwe dan Cina telah meningkat sebanyak \$106 miliar sampai pada tahun 2008 (Gutu, 2009). Bantuan dari Cina ini bersifat unconditional aid untuk mengatasi permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi di Zimbabwe melalui kerangka kerja Strategic Partnership yang bisa menggantikan peranan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) bagi Zimbabwe (Harrington, 2003).

Zimbabwe pun berhasil membuat Cina untuk lebih banyak melakukan impor dari negara Zimbabwe dibandingkan ekspor. Pada tahun 2002, ekspor utama Zimbabwe pada waktu itu adalah tembakau, yang menyumbang lebih dari 90% mengalir ke negara Cina. Ekspor

utama pada waktu itu adalah tembakau, yang menyumbang lebih dari 90 % ekspor ke Cina. Selain itu, Zimbabwe juga mendapatkan sumbangan makanan dan bantuan tunai dari Cina untuk membeli makanan akibat melemahnya kondisi perekonomian Zimbabwe. Zimbabwe juga mendapat dukungan dalam pembangunan fasilitas olahraga, rumah sakit dan sekolah, dan investasi perusahaan-perusahaan Cina termasuk pabrik-pabrik tekstil dan semen. Perusahaan-perusahaan milik negara, seperti China Aero-technology Import and Export Corporation (CATIC) juga telah melakukan perjanjian investasi dengan perusahaan Zimbabwe, ZESA Holdings, untuk perbaikan pembangkit listrik. CATIC juga akan berinvestasi US \$400 juta dalam penambangan Zimbabwe pada tahun 2005. Cina telah berkontribusi pada pengembangan manufaktur baja di Zimbabwe melalui keterlibatan keuangannya dalam perbaikan blast furnace di Zimbabwe Iron and Steel Company (ZISCO). Cina juga telah memberikan pinjaman tanpa bunga dan hibah kepada Zimbabwe untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur sejak ekonomi Zimbabwe mengalami krisis yang hebat akibat dampak dari sanksi negara-negara Barat. (Valy, 2008)

Dalam pemerintahan Robert Mugabe pada saat itu, Zimbabwe kerap membeli

perlengkapan militer, seperti pesawat, persenjataan, radar pertahanan udara, dan peralatan medis dari Beijing, Cina. Cina juga rutin mengirim penasehat militer ke angkatan bersenjata Zimbabwe. Pemerintah Zimbabwe pun mengirim perwira untuk melakukan pelatihan di Cina (Harrington, 2003). Penjualan persenjataan ke Zimbabwe ini terjadi setelah adanya sanksi dari negara-negara Barat. Pembelian senjata ini menunjukkan keinginan Mugabe untuk menjaga pasukan keamanan negara agar tetap di sisinya (Oxford Analytica, 2007). Cina menghabiskan \$100 juta untuk membangun sebuah akademi militer profesional di Zimbabwe, Harare's National Defence College pada tahun 2012. Perguruan tinggi tersebut dirancang untuk memperbaiki sistem intelijen, keamanan dan pertahanan (Chingono H. , 2013).

E. Kesimpulan

Bab terakhir ini bertujuan menjelaskan rangkuman akhir dari semua hasil penelitian dan bab-bab yang penulis bahas sebelumnya tentang bagaimana strategi Robert Mugabe dalam menghadapi sanksi Barat akibat dari kebijakan Fast Track Land Reform Programme.

Berawal dari penjelasan mengenai sejarah awal terjadinya permasalahan rasisme, undang-undang pertanahan,

politik, dan ekonomi Zimbabwe yang mengalami fluktuasi. Rhodesia Selatan, nama negara Zimbabwe sebelum kemerdekaan, awalnya ditemukan oleh seorang dari British (Inggris) yang bernama Cecil Rhodes. Rhodes merasa sangat tertarik dengan wilayah Rhodesia karena memiliki kekayaan alam yang berlimpah, seperti kaya akan mineral, bahan tambang, dan pertaniannya. Dari sinilah awal mula masyarakat kulit putih dari Eropa berdatangan ke wilayah Rhodesia Selatan (Zimbabwe) untuk mencari peruntungan, membangun tempat tinggal, dan menguasai tanah di sana.

Walaupun masyarakat kulit putih merupakan kaum minoritas di Rhodesia Selatan (Zimbabwe) pada saat itu, tetapi mereka berhasil menguasai perpolitikan dan tanah. Pembagian tanah pada saat itu sangat tidak adil bagi kaum kulit hitam. Masyarakat kulit putih mendapatkan tanah yang luas dan subur. Sedangkan, kaum kulit hitam mendapatkan tanah yang sempit dan tandus. Tanah yang didapatkan oleh kaum kulit putih berhasil diolah menjadi pertanian yang sukses. Hasil dari pertanian tersebut juga menjadi faktor berkembang pesatnya ekonomi Rhodesia Selatan (Zimbabwe) pada saat itu. Karena warga pribumi kulit hitam tidak pandai mengolah pertanian, mereka pun bekerja pada pertanian milik kulit putih untuk

mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Adanya perasaan ditindas dan ketidakadilan yang dirasakan kaum kulit hitam membuat mereka melakukan aksi protes terhadap kulit putih. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menentang pemisahan kolonial dan akuisisi tanah yang tercantum dalam undang-undang pertanahan. Hal tersebut menghasilkan penyelesaian damai pada tahun 1979 yang ditengahi oleh pemerintah Inggris. Gencatan senjata yang diadakan di Lancaster House, Inggris ini sekaligus menjadi awal dari kemerdekaan Rhodesia Selatan (Zimbabwe).

Setelah Robert Mugabe berkuasa di Zimbabwe, ia berkomitmen untuk melakukan pembebasan warga kulit hitam Afrika, rekonsiliasi rasial, dan reformasi tanah bagi rakyatnya. Awalnya, permasalahan reformasi tanah sudah dilaksanakan pada tahun 1997. Namun, program tersebut dianggap Mugabe belum maksimal. Dari sinilah pencetus kebijakan Fast Track Land Reform Programme dibuat pada tahun 2000. Program reformasi tanah yang lebih radikal ini membuat negara-negara Barat, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia menjatuhkan sanksi terhadap negara Zimbabwe. Hal tersebut terjadi karena negara-negara Barat mendapati adanya tindakan intimidasi dan kekerasan

dalam kebijakan Fast Track Land Reform Programme. Sanksi yang berupa pemberhentian bantuan dana ke Zimbabwe, embargo senjata, pembatasan perjalanan diplomatik dan pembekuan aset para pejabatnya, serta menarik investasi, membuat Zimbabwe mengalami krisis ekonomi yang parah. Negara-negara Barat tersebut menargetkan individu dan perusahaan tertentu yang berpengaruh di Zimbabwe. Sanksi dari Uni Eropa juga menargetkan individu tertentu, baik di dalam pemerintah Zimbabwe dan yang terkait dengannya.

Melihat realitas adanya ketidakstabilan politik, ekonomi yang memburuk, dan dikucilkan oleh komunitas internasional akibat dari adanya kebijakan Fast Track Land Reform Programme, membuat Robert Mugabe mencanangkan strategi penerapan kebijakan Look East pada tahun 2003 demi bertahan dari krisis ekonomi yang dihadapi Zimbabwe. Mugabe berpaling ke negara-negara Timur, karena didasarkan pada keyakinan, bahwa lebih baik untuk menemukan kelompok sekutu baru yang akan terlibat dengan Zimbabwe tanpa khawatir tentang politik dalam negerinya, daripada mencoba menjilat dengan negara-negara yang berusaha hanya untuk melemahkan negara Zimbabwe. Mugabe pun merealisasikan strategi menghadapi sanksi-sanksi Barat

dengan menerapkan kebijakan Look East tersebut dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara Timur, seperti Indonesia, India, Iran, dan Cina.

Apa yang menyatukan negara-negara ini adalah bahwa mereka cenderung memiliki hubungan yang ambivalen atau bermusuhan dengan negara-negara Barat. Mugabe telah mengklaim bahwa sejarah kolonial mereka yang serupa membuat negara-negara ini menjadi sekutu yang lebih baik untuk Zimbabwe daripada negara-negara Barat. Dia juga menekankan bahwa negara-negara Timur ini telah makmur meskipun tanpa bantuan ekonomi dan politik dari Barat. Alih-alih dilemahkan oleh pengalaman, negara-negara Timur ini telah muncul sebagai pesaing ekonomi yang signifikan bagi negara-negara Barat. Strategi yang dibuat oleh Robert Mugabe melalui kebijakan Look East ini telah membantu Zimbabwe tetap bertahan menghadapi lawan-lawannya.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan, A. H. (2008). *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Bandung: CV. Angkasa.
- Commercial Farmers' Union. (2001). *White farmers see major escalation of violence in Zimbabwe*. Zimbabwe: AFP.
- Griffiths, M. T. (2002). *International Relations the Key Concepts*, 2nd. London: Routledge.
- Jatmika, D. S. (2016). *Hubungan internasional Di Kawasan Afrika*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mabaye, T. M. (2005). *LAND REFORM IN ZIMBABWE: An Examination of Past & Present Policy, Shortcomings & Successes and Recommendations for Improvement*. California: EDGE.
- Marbun, B. (2003). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marongwe, N. (2004). *Socio-economic conflicts of the Fast Track resettlement Programme*. Harare: riedrich Eber Stiftung and Institute of Development Studies.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional- Disiplin dan Metodologi*. Dalam J. Lovel, *Foreign Policy in Perspective* (hal. 191). Jakarta: LP3ES.
- Meredith, M. (2007, September 25). *Mugabe (Power, Plunder, And the Struggle for Zimbabwe)*. United States: Public Affairs.

E-Journal:

- Chigora, P. (2007). *On Crossroads: Zimbabwe's Foreign Policy and the West*. Dipetik December 12, 2019, dari Semantic Scholar: <https://www.semanticscholar.org/paper/On-Crossroads%3A-Zimbabwe%27s-Foreign-Policy-and-the-Chigora/6bf85e8fc6959d16d58001cea304c0ff6baca4e5>

Journal:

- Bonarjee, M.-F. (2013). *Bergen Resource Centre For International Development 3 Decades*

Of Land Reform In Zimbabwe; Perspectives of Social Justice & Poverty Alleviation. Universitetet i Bergen, 5-6.

- Chingono, H. (2010). *Zimbabwe Look East Policy*. China Monitor. Stellenbosch: Centre for Chinese Studies.
- Chingono, H. (2010). *Zimbabwe sanctions: An analysis of the "Lingo" guiding the perceptions of the sanctioners and the sanctionees*. *African Journal of Political Science and International Relations*, 70.
- Chitsike, F. (2003, December 2-5). *A Critical Analysis of the Land Reform Programme in Zimbabwe*. Fig.Net, 5.
- Chun, Z. (2014). *China-Zimbabwe Relations: A Model of China-Africa Relations*. *The South African Institute of International Affairs (SAIIA)*, 9.
- Dwivedi, D. S. (2012). *Alliances in International Relations Theory*. IRJC ; *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 224-225. DW
- Fathiraini, N. (2015). *Politik Luar Negeri Hu Jintao Terhadap Zimbabwe: Sebuah Pandangan Konstruktivis*. *Repository UGM*, 1-2.
- Hermawan, R. (2017). *Zimbabwe pada masa Pemerintahan Zimbabwe (1980-2008) : Suatu Kajian Historis*. repository.upi.edu, 40.
- Human Rights Watch. (2002). *ZIMBABWE ; FAST TRACK LAND REFORM IN ZIMBABWE*. Hrw.org, 6.
- Mbanje, C. B. (2011). *An Analysis of the Effectiveness of Sanctions as a Law Enforcement Tool in International Law: A Case Study of Zimbabwe from 2001 to 2013*. *Open Journal of Political Science*, 292.
- Mdlongwa, T. M. (2015). *Look east or look least? The Zimbabwean experience of Chinese economic investment in selected texts and examples*. *International Research Journal of Arts and Social Science*, 77.
- Ministry of Lands, A. a. (2001). *Land Reform and Resettlement Programme: Revised Phase II*. Harare; Government of Zimbabwe, 2-4.

Moyo, S. (2011). Changing Agrarian Relations after Redistributive Land Reform in Zimbabwe. *Journal of Peasant Studies*, 38.

Moyo, S. (2011). Three decades of agrarian reform in Zimbabwe. *The Journal of Peasant Studies*, 202.

Ndakaripa, M. (2014). nited States/European Union 'Sanctions' and the Contestation for Political Space in Zimbabwe. *American International Journal of Contemporary Research*, , 4.

Nyemba, E. Z., Zungura, M., & Mhandara, L. (2013). India's Trade and Investment Engagement with Zimbabwe: Prospects for Growth and Partnership in a Globalised International System. *International Journal of Research In Social Sciences* , 33-34.

Nyoni, T. (2019). The Curse is Real in Zimbabwe: Economic Sanctions Must Go! Munich Personal RePEc Archive, 2.

Ojajorotu, V., & Kamidza, R. (2018). Look East Policy: The Case of Zimbabwe–China Political and Economic Relations Since 2000. *SAGE Journals*, 2-5.

Taylor, I., & Williams, P. (2002). *The Limits of Engagement: British Foreign Policy and the Crisis in Zimbabwe*. Oxford University Pres, 555.

Youde, J. (2007). *Why Look East? Zimbabwean Foreign Policy and China* . Indiana University Press, 3-19.

Zikhali, P. (2008). *Fast Track Land Reform and Agricultural Productivity in Zimbabwe*. IDEAS, 1.

Report:

United Nations Development Programme. (2002). *Zimbabwe: Land Reform and Resettlement: Assessment and Suggested*. New York: UNDP.

Subagyo, D. A. (2016). *Mata Kuliah Teori Ilmu Hubungan Internasional Teori-teori Kerjasama Internasional*. Oleh : Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si. Dipetik December 13, 2019, dari DocPlayer: <https://docplayer.info/29819456-Mata-kuliah-teori-ilmu-hubungan-internasional-teori-teori-kerjasama-internasional-oleh-dr-agus-subagyo-s-ip-m-si.html>

Website:

AAM Archives Committee. (2019). Zimbabwe. Dipetik December 1, 2019, dari Forward to Freedom; The history of the British Anti-Apartheid Movement 1959-1994: <https://www.aamarchives.org/history/zimbabwe.html>

AFP. (2007, September 26). Zimbabwe, Iran mull coalition against 'bullies'. Dipetik December 15, 2019, dari The Indian Express: <http://archive.indianexpress.com/news/zimbabwe-iran-mull-coalition-against-bullies/221495>

African Development Bank Group. (2016). AfDB Annual Report 2016. Dipetik September 22, 2019, dari African Development Bank: <https://www.afdb.org/en/documents/document/afdb-annual-report-2016-95954>

African Union. (2017, July 31). Dipetik December 13, 2019, dari African Union; a United and Strong Africa: <http://www.african-union.org/apa-itu-apartheid-di-afrika-selatan/>

African Union. (2017, July 31). Apa Itu Apartheid Di Afrika Selatan? Dipetik November 30, 2019, dari African Union: <http://www.african-union.org/apa-itu-apartheid-di-afrika-selatan/>

Australian Government. (2011). Zimbabwe Sanctions Regime. Dipetik December 13, 2019, dari Australian Government; Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Documents/sanctions-snapshot-zimbabwe.pdf>

BBC News. (2000, May 17). Zimbabwe: Will sanctions make a difference? Dipetik September 21, 2019, dari BBC News: http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/735962.stm

Bradbury, W., & Malden, N. (2008, October 7). Southern Rhodesia. Dipetik December 19, 2019, dari Uno Stamps: https://www.unostamps.nl/country_southern_rhodesia.htm

Bureau of African Affairs. (2019, August 2). U.S. Relations With Zimbabwe. Dipetik December 19, 2019, dari U.S. Department

- of State: <https://www.state.gov/u-s-relations-with-zimbabwe/>
- Chigora, P. (2007). On Crossroads: Zimbabwe's Foreign Policy and the West. Dipetik December 12, 2019, dari Semantic Scholar: <https://www.semanticscholar.org/paper/On-Crossroads%3A-Zimbabwe%27s-Foreign-Policy-and-the-Chigora/6bf85e8fc6959d16d58001cea304c0ff6baca4e5>
- Cobuild, C. (2006). Definition of sanction. Dipetik November 25, 2019, dari Collins: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sanction>
- Community, S. A. (2012). About SADC. Dipetik April 30, 2019, dari Southern African Development Community: Towards a Common Future: <https://www.sadc.int/about-sadc/overview/>
- Davie, A. A. (2017, December). Apa yang dimaksud dengan Teori Aliansi di dalam Hubungan Internasional? Dipetik December 13, 2019, dari Dictio: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-alian-si-di-dalam-hubungan-internasional/14605>
- Dawson, M. W. (2015, December 14). How Economic Sanctions Affect Poor People. Retrieved January 6, 2020, from The Federalist: <https://thefederalist.com/2015/12/14/how-economic-sanctions-affect-poor-people/>
- Debora, Y. (2017, November 21). Cina, Mugabe, dan Kudeta Zimbabwe. Dipetik November 20, 2019, dari Tirto.id: <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/cina-mugabe-dan-kudeta-zimbabwe-cAnr>
- Department of International Trade. (2012, August 13). Trade sanctions on Zimbabwe . Dipetik December 13, 2019, dari Gov.UK: <https://www.gov.uk/guidance/arms-embargo-on-zimbabwe#arms-embargo>
- Downie, N. (2011). Rhodesian Forces Associations. Dipetik April 30, 2019, dari Rhodesia Guerrilla Warfare: <http://rhodesianforces.org/RhodesiaStudyinmilitaryincompetence.htm>
- Embassy of India. (2019, January 30). India Zimbabwe Relations. Dipetik December 18, 2019, dari Embassy of India: https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Briefs_as_on_30.01.2019.pdf
- Embassy of the Republic of Indonesia in Harare. (2018). Zimbabwe. Dipetik December 12, 2019, dari Embassy of the Republic of Indonesia: <https://kemlu.go.id/harare/en/read/zimbabwe/2727/etc-menu>
- Estonian Presidency of the Council of the European Union. (2017, September 29). EU Sanctions Map. Dipetik December 10, 2019, dari EU Sanctions Map: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/40/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>
- F. Tombindo, N. T. (2016, January). Economic repercussions of the Look East Policy in Zimbabwe . Dipetik December 15, 2019, dari Eldis: <https://www.eldis.org/document/A100845>
- Farrar-Wellman, A. (2010, May 9). Zimbabwe-Iran Foreign Relations . Dipetik December 15, 2019, dari Critical Threats: <https://www.criticalthreats.org/analysis/zimbabwe-iran-foreign-relations>
- Fars News Agency. (2007, December 9). Iran Opens Library In Zimbabwe. Dipetik December 15, 2019, dari Fars News Agency: <http://english.farsnews.ir/newstext.php?nn=8606210404>
- Fox News. (2006, November 21). Zimbabwe, Iran Think Alike, Says President Mugabe. Dipetik December 15, 2019, dari Fox News: <http://www.foxnews.com/story/0,2933,231021,00.html>
- GlobalSecurity.org. (t.thn.). Rhodesian Bush War, Second Chimurenga, Zimbabwe Liberation Struggle. Dipetik May 4, 2019, dari GlobalSecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/zimbabwe.htm>
- Grubel, J. (2008, December 17). Australia toughens sanctions on Zimbabwe. Dipetik December 30, 2019, dari Reuters: https://www.reuters.com/article/idUSSYD77548._CH_.2400

- Gutu, O. (2009, December 8). Zimbabwe's "look east" policy: a poisoned chalice? Dipetik December 20, 2019, dari El Transnational Institute: <https://www.tni.org/es/node/4683>
- Harrington, M. (2003, January 8). Chinese tied to Zimbabwe. Dipetik November 20, 2019, dari WikiLeaks: https://search.wikileaks.org/plusd/cables/03HARARE48_a.html
- HM Soeharto. (1991). RI-Zimbabwe Segera Kerjasama Bidang Ekonomi dan Perdagangan. Dipetik December 20, 2019, dari HM Soeharto; Menggapai Tinggal Landas: <https://soeharto.co/ri-zimbabwe-segera-kerja-sama-bidang-ekonomi-dan-perdagangan/>
- Human Rights Watch. (2002, March). Role Of The International Community. Dipetik December 15, 2019, dari HRW.ORG: <https://www.hrw.org/reports/2002/zimbabwe/index.htm#TopOfPage>
- Humaniora. (2016, April 18). 1980: Zimbabwe Merdeka. Dipetik December 19, 2019, dari Media Indonesia : <https://mediaindonesia.com/read/detail/40911-1980-zimbabwe-merdeka>
- Humanitarian, T. N. (2003, January 20). Zimbabwe: Year-ender 2002 - Chronology of "fast-track" land reform. Dipetik September 21, 2019, dari reliefweb: <https://reliefweb.int/report/zimbabwe/zimbabwe-year-ender-2002-chronology-fast-track-land-reform>
- KBBI. (t.thn.). bijak. Dipetik September 22, 2019, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/bijak>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare, Republik Zimbabwe. (2018). Dipetik November 25, 2019, dari Keterangan Dasar Negara Republik Zimbabwe: <https://kemlu.go.id/harare/id/read/keterangan-dasar-negara-republik-zimbabwe/2727/etc-menu>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). Keterangan Dasar Negara Republik Zimbabwe. Dipetik September 21, 2019, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare, Republik Zimbabwe: <https://kemlu.go.id/harare/id/read/keterangan>
- an-dasar-negara-republik-zimbabwe/2727/etc-menu
- Kresna. (2017, September 6). Teori Strategi Dalam Hubungan Internasional. Dipetik April 30, 2019, dari Konsultasi Skripsi: <http://konsultaskripsi.com/2017/09/06/teori-strategi-dalam-hubungan-internasional-skrpsi-dan-tesis/>
- Lawrence, G. M. (2019, August 8). The fast-track land reform and agrarian change in Zimbabwe. Dipetik September 23, 2019, dari Taylor&Francis Group: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03056244.2019.1622210>
- Ligne, A. E. (2008, March 14). Iran, Zimbabwe Seal Tractor Deal. Dipetik December 15, 2019, dari Afriquejet: <http://www.afriquejet.com/news/africa-news/iran,-zimbabwe-seal-tractor-deal-20080314175.html>
- Macmillan Dictionary. (2017). Sanction. Dipetik November 25, 2019, dari Macmillan Dictionary: <http://www.macmillandictionaryblog.com/sanction>
- Mea.Gov. (2013, December). India-Zimbabwe Relations. Dipetik December 30, 2019, dari Mea.Gov: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Zimbabwe_December_2013.pdf
- Michelini, M. (2019, June 14). The Differences Between East And West In Terms Of Culture And Education. Dipetik December 19, 2019, dari Global From Asia: <https://www.globalfromasia.com/east-west-differences/>
- Murisa, T., & Bloemen, S. (2018, November 8). Hey America, it's time to end Zimbabwe's economic punishment. Dipetik December 19, 2019, dari African Arguments: <https://africanarguments.org/2018/11/08/hey-america-time-end-zimbabwe-economic-punishment-zidera/>
- Mushekwe, I. (2009, January 25). Robert Mugabe Begs Libya, Iran, Russia, and China to Help Zimbabwe Beat Sanctions. Dipetik December 15, 2019, dari Telegraph: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/zimbabwe/4332782/Robert-Mugabe-begs-Libya-Iran->

- Russia-and-China-to-help-Zimbabwe-beat-sanctions.html
- Mutasa, C. (2017, Agustus 30). Brief: A Brief History of Land in Zimbabwe:1890-Today. Dipetik November 19, 2019, dari Focus on Land in Africa: <http://www.focusonland.com/countries/a-brief-history-of-land-in-zimbabwe1890today/>
- New Zimbabwe. (2009, November 12). Iran to Build Gas Power Plant in Zimbabwe. Dipetik December 15, 2019, dari New Zimbabwe: <http://www.newzimbabwe.com/pages/china4.11789.html>
- Oxford Analytica. (2007, December 28). Zimbabwe's 'Look East' Disappoints. Dipetik December 18, 2019, dari Forbes: <https://www.forbes.com/2007/12/27/zimbabwe-harare-mugabe-cx-1228oxford.html#793b71227019>
- Payvand. (2006, November 25). Zimbabwe Signs Fuel Deal with Iran. Dipetik December 15, 2019, dari Payvand: <http://payvand.com/news/06/nov/1299.html>
- Republik Eusosialis Tawon. (2015, April 4). Perang Belukar Rhodesia yang Melahirkan Negara Zimbabwe. Dipetik December 13, 2019, dari Republik Eusosialis Tawon: <https://www.re-tawon.com/2015/04/perang-belukar-rhodesia-yang-melahirkan.html>
- Reuters. (2009, December 11). Mugabe Backs Iran's Nuclear Programme. Dipetik December 15, 2019, dari New Zimbabwe: <http://www.newzimbabwe.com/pages/china21.14043.html>
- Riza, B. (2017, November 18). Mugabe Dituding Membangkrutkan Ekonomi Zimbabwe yang Kaya Alam. Dipetik September 23, 2019, dari Tempo.Co: <https://dunia.tempo.co/read/1034678/mugabe-dituding-membangkrutkan-ekonomi-zimbabwe-yang-kaya-alam/full&view=ok>
- Serikat Petani Indonesia. (2019, September 5). Mengenal Zimbabwe: Catatan Dari Konferensi Midterm La Via Campesina (1). Dipetik December 15, 2019, dari Serikat Petani Indonesia: <https://spi.or.id/mengenal-zimbabwe-catatan-dari-konferensi-midterm-la-via-campesina-1/>
- Setyawan, D. (2015, Desember 22). Politik Apartheid. Dipetik November 25, 2019, dari Donisaurus: <http://www.donisetyawan.com/politik-apartheid/>
- Setyawan, D. (2015, December 22). Politik Apartheid. Dipetik December 13, 2019, dari Donisaurus: <http://www.donisetyawan.com/politik-apartheid/>
- Subagyo, D. A. (2016). Mata Kuliah Teori Ilmu Hubungan Internasional Teori-teori Kerjasama Internasional. Oleh : Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si. Dipetik December 13, 2019, dari DocPlayer: <https://docplayer.info/29819456-Mata-kuliah-teori-ilmu-hubungan-internasional-teori-teori-kerjasama-internasional-oleh-dr-agus-subagyo-s-ip-m-si.html>
- Sudarmanto, H. (2010, February 15). Zimbabwe Riwayatmu Kini Menatap Masa Depan Tanpa Barat. Dipetik December 15, 2019, dari Blogspot.com: <http://harysudarmanto.blogspot.com/2010/02/zimbabwe-riwayatmu-kini-menatap-masa.html>
- Syahrianto, M. (2019, September 6). Kisah Hidup Robert Mugabe: Pejuang Kemerdekaan hingga Autokrat. Dipetik November 25, 2019, dari Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read245397/kisah-hidup-robert-mugabe-pejuang-kemerdekaan-hingga-autokrat.html>
- Tawon, R. E. (2015, April 4). Perang Belukar Rhodesia yang Melahirkan Negara Zimbabwe. Dipetik April 30, 2019, dari Republik Eusosialis Tawon : <https://www.re-tawon.com/2015/04/perang-belukar-rhodesia-yang-melahirkan.html>
- The Guardian. (2002, February 18). EU imposes sanctions on Zimbabwe . Dipetik November 10, 2019, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2002/feb/18/zimbabwe>
- The Herald. (2010, January 1). Zimbabwe: 'Iran Will Stand By Zimbabwe. Dipetik December 15, 2019, dari All Africa:

- <http://allafrica.com/stories/201001040024.html>
- The Jakarta Post. (2014, November 14). Zimbabwe wants stronger relations with RI. Dipetik December 28, 2019, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14/zimbabwe-wants-stronger-relations-with-ri.html>
- The Patriot. (2018, January 11). The Struggle for Land in Zimbabwe (1890-2010)...when financial sanctions were imposed. Dipetik September 21, 2019, dari The Patriot: https://www.thepatriot.co.zw/old_posts/the-struggle-for-land-in-zimbabwe-1890-2010-when-financial-sanctions-were-imposed/
- The World Bank. (t.thn.). Zimbabwe. Dipetik September 21, 2019, dari The World Bank: <https://data.worldbank.org/country/zimbabwe>
- ThoughtCo. (2019, August 10). Examples of Sanctions in International Relations . Dipetik November 25, 2019, dari ThoughtCo.: <https://www.thoughtco.com/what-are-sanctions-3310373>
- Utomo, A. P. (2018, February 11). Zimbabwe Tolak Kembalikan Tanah ke Petani Kulit Putih. Dipetik November 22, 2019, dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/11/05200031/zimbabwe-tolak-kembalikan-tanah-ke-petani-kulit-putih>
- Valy, B. (2008, March). Zimbabwe “Look East” policy is starting to bear fruit. Dipetik November 20, 2019, dari Southern African Research and Documentation Centre: <https://www.sardc.net/en/southern-african-news-features/zimbabwe-look-east-policy-is-starting-to-bear-fruit/>
- VOA. (2007, September 25). At UN, Zimbabwe’s Mugabe and Iran’s Ahmadinejad Line Up Against West. Dipetik December 15, 2019, dari VOA News: <http://www1.voanews.com/zimbabwe/news/a-13-56-74-2007-09-25-voa78-69001847.html>
- Volodzko, D. (2016, June 3). China in Africa, Part II: The Bad ; Parsing China’s relationship with African dictators, like Robert Mugabe of Zimbabwe. Dipetik November 20, 2019, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/06/china-in-africa-part-ii-the-bad/>
- Xinhua. (2006, November 26). Zimbabwe president back home from fruitful visit to Iran:report. Dipetik December 15, 2019, dari People's Daily Online: http://en.people.cn/200611/26/eng20061126_325174.html
- Xinhua. (2006, November 26). Zimbabwe president back home from fruitful visit to Iran:report. Dipetik December 15, 2019, dari People's Daily Online: http://en.people.cn/200611/26/eng20061126_325174.html
- Xinhua. (2010, January 2). Iran Says Ready to Offer Assistance to Zimbabwe. Dipetik December 15, 2019, dari Xinhua: http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/02/content_12741789.htm
- Youde, J. (2013, April 2). The Active Pariah: Zimbabwe's 'Look East' Policy. Dipetik December 18, 2019, dari World Politics Review: <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/12825/the-active-pariah-zimbabwes-look-east-policy>